

**PENERBITAN SURAT PENUGASAN
DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
DIKAITKAN DENGAN ASAS PEMERATAAN KESEHATAN**
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang- Undang Nomor 29
tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo PERMENKES Nomor
512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
Siti Mahmudah
NPM: 09.93.0011



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 220 / S2 / MHK / C1

TGL : 18 / 04 ' 12

PARAF : uf

Kepada
**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011**

Tesis

PENERBITAN SURAT PENUGASAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DIKAITKAN DENGAN ASAS PEMERATAAN KESEHATAN
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan PERMENKES Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran)

Diajukan oleh:
Siti Mahmudah
NIM: 09.93.0011

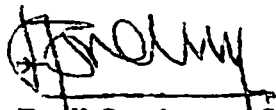
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Alma Lucyati, MKes., MSi., MH.Kes tanggal.....

Pembimbing II



Y. Budi Susiarno, SH., MH tanggal.....



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **SITI MAHMUDAH**

Nim : **09.93.0611**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 11 Juli 2011

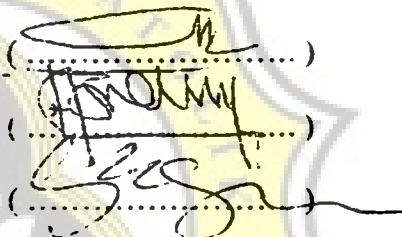
Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **Dr. Alma Lucyati, MKes, MSi., MH.Kes**

2. **Y. Budi Sarwo, SH., MH.**

3. **Dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)**



(.....)
(.....)
(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 11 Juli 2011



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

PERNYATAAN

Yang bertanda- tangan di bawah ini saya, Siti Mahmudah, Peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, NPM 09.93.0011,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25 Juni 2011

Siti Mahmudah

ABSTRACT

THE ISSUE OF DUTY LETTER FOR SPECIALISTS IN RELATED TO EQUALITY IN HEALTH SERVICES PRINCIPLE

Medical Doctors who are going to practise in Indonesia must have a medical licence. Medical licence supplied for dentist should be not more than 3 dental centres. The medical practice management aim at the patient safety; medical service quality maintenance; the certainty of law for public society, general practice doctors, and dentists. To fulfill the need of the specialist services, the health department should be able to issue a duty letter for particular specialists so they'll able to work in any hospitals based on the demand from Province/Regency Health Department.

The objective of the research is to get the illustration whether the issue of duty letter for specialists to work hospitals can fulfil an equal health services.

The approaching method is a normative judicial method by implementing a law analysis through a literature study in order to obtain secondary data which is related to the medical practices. This is an analysis descriptive research or the collecting method based on law study. Data analysis we applied is Qualitative Normative.

It is concluded that the duty letter is a written proof that provided by the head of province health department to particular specialists to work at a particular hospitals in a particular time based on the demand from the head of regency health department. The principle of equal health services is creating the health quality effort which is fair and affordable by all level of communities both *both geographically and economically*. The issue of duty letter for specialist haven't yet fulfilled the equal health services due to the numbers of specialist is not balance with the population numbers and the uneven distribution of specialist in the whole areas of Indonesia.

Keywords: Medical Licence, Duty letter, Equal health Services

ABSTRAK

Dokter yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki Surat Ijin Prkatik (SIP). SIP dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter /dokter gigi. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialis Dinas Kesehatan dapat memberikan Surat Tugas dokter spesialis tertentu untuk bekerja di Rumah Sakit berdasarkan permintaan Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dengan kemampuan dokter tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran apakah dengan penerbitan Surat Tugas untuk Dokter Spesialis di Rumah Sakit dapat menyebabkan terpenuhinya asas pemerataan pelayanan kesehatan.

Metode penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik kedokteran. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitis. Cara pengumpulan data dengan menggunakan studi hukum. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Disimpulkan bahwa Surat Tugas merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi kepada dokter spesialis tertentu untuk bekerja Rumah Sakit tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan permintaan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Asas pemerataan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata baik geografis maupun ekonomis. Penerbitan Surat Penugasan Dokter Spesialis, belum dapat memenuhi asas pemerataan pelayanan kesehatan, karena jumlah dokter spesialis belum seimbang dengan jumlah penduduk, dan distribusi / penempatan dokter belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci : SIP, Surat Tugas, Pemerataan Pelayanan Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga memungkinkan penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari Penerbitan Surat Tugas Dokter Spesialis di Rumah Sakit dikaitkan dengan Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan (Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan PERMENKES Nomor 512/MENKES/PER/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran)

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terlaksana berkat bimbingan, penghargaan, sumbangan pikiran, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih Prof.Dr.Ir.Budi Widinarko, Msi, sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata yang bekenan menerima penulis sebagai peserta dan memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan program Program Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas yang Bapak pimpin.

Rasa terima kasih jugapenulis sampaikan kepada yang terhormat Prof.Dr.A.WidantiS,SH,CN., sebagai Ketua Program Studi Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, serta Dr. Endang Wahyati, SH.,MH., sebagai Sekretaris Program Studi Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, saya menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberikan bimbingan dan sarat pada penulis saat penulis menyelesaikan penelitian hingga penyusunan tesis ini dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran dan pengertian yang mendalam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kshih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Pembimbing Utama dr. Alma Lusyati.,Mkes.,Msi.,MHKes, serta Y. Budi Sarwo,SH.,MH sebagai pembimbing pendamping yang telah meluang waktu, tenaga, serta memberikan bimbingan dan saran pada saat penulis menyelesaikan penelitian hingga penyusunan tesis ini. Tiada ungkapan kata-kata yang dapat penulis ucapkan dalam ketulusan membimbing penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : dr. Sofyan dahlan, SpF(K)., sebagai penguji yang telah memberikan koreksi, dan perbaikan baik dalam ejaan,tata bahasa maupun untaian kalimat dalam penulisan ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang terhormat Prof. Dr.Wila Chandrawila S,SH.,CN., sebagai Koordinator Program Studi di Bandung yang telah memberikan kesempatan, semangat, dukungan, dan wawasan serta bimbingan selama penulis mengikuti kuliah

Demikian pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh semua Dosen Pengajar Program Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata yang selama pendidikan telah membantu saya baik dengan bimbingan, dorongan, semangat, masukan, dan kesediaannya untuk terbebani dengan tugas-tugas yang seharusnya saya lakukan.

Kepada yang terhormat Shinta Dewi dan seluruh karyawan Program Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Sogijapranata atas segala bantuan dan fasilitas serta kemudahan yang memperlancar jalannya penelitian serta penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada teman-teman Program Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata angkatan 7 tahun 2009 Bandung, yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat dr. Bayu Wachyudi, MPH, SpOG selaku Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin, dan Dr. dr. Agus Hadian Rahim, SpOT(K), MEpid., MHKes, selaku Direktur SDM & Pendidikan RSUP Dr. Hasan Sadikin yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dorongan, bimbingan, serta semangat kepada penulis dalam mengikuti pendidikan Program Magister dalam Konsentrasi

penulis dalam mengikuti Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata.

Terakhir ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Almarhum Ayahan dan Ibunda Wasilah Dainuri yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan memberikan doa sejak kecilsampai sekarang.

Penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Suamiku tercinta Joko Ismoyo yang dengan setia dan penuh megeritian selalu mendampingi dan memberikan dorongan, penulis sampikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada atas pengertian Ananda tersayang yang menjadi motivator serta dorongan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas segala kebaikan dan ketulusan, semoga Allah Subhana Wa Ta'ala dapat membalas budi baik yang telah Bapak, Ibu berikan pada penulis. Amin ya rabbal alamin.

Bandung, Juli 2011

Siti Mahmudah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Teknik Pengumpulan Data	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengantar	20
B. Kesehatan	21
1. Pengertian Kesehatan	22
2. Rumah Sakit	26
3. Praktik Kedokteran	35

C. Surat Ijin Praktik Dokter dan Surat Penugasan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit	42
D. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran	50
E. Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
1. Surat Penugasan Dokter Spesialis di Rumah Sakit	69
2. Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan	81
3. Hubungan antara Surat Penugasan Dokter Spesialis di Rumah Sakit dengan Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan	90
BAB IV PENUTUP	
Simpulan	106
Saran	108
Daftar Pustaka	109

C. Surat Ijin Praktik Dokter dan Surat Penugasan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit	42
D. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran	50
E. Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan	57
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 69
1. Surat Penugasan Dokter Spesialis di Rumah Sakit	69
2. Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan	81
3. Hubungan antara Surat Penugasan Dokter Spesialis di Rumah Sakit dengan Asas Pemerataan Pelayanan Kesehatan	90
 BAB IV PENUTUP	
Simpulan	106
Saran	108
Daftar Pustaka	109
Lampiran	
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	